



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT GARAM (PERSERO)
UNIT KERJA : DIREKTUR PENGEMBANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIF HAENDRA**
2. Jabatan : **DIREKTUR PENGEMBANGAN**
3. NHK : **275739**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.800.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/70 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m²/150 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/70 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Bangunan Seluas 25 m² di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m²/200 m² di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 918.000.000**

1. MOBIL, TOYOYA CAMRY SEDAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FINO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. MOBIL, TOYOTA VOXY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000



6. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
260.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	696.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.119.473.330
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.533.473.330
III. HUTANG	Rp.	250.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.282.973.330

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.